SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 35 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018-2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU);

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrsi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya 2018-2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabuapten Nagan Raya Tahun 2018-2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik.....

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggore Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pegelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah di ubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Negara Pardayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

18. Peraturan Menteri Negara Pardayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penepatan Kinerja dan Pelaporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

20. Peraturan.....

20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

22. Keputusan Kepala LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

23. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;

25. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Bupati Nagan Raya beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai pelaksana fungsi eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5. Indikator.....

5. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang telah ditetapkan.

6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya di singkat IKU adalah Ukuran Keberhasilan Organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan Ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiantan sebagai Penjabaran dari Tugas Pokok dan fungsi Organisasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksudkan sebagai Acuan Ukuran Kinerja yang digunakan oleh Pemerintahan Kabupaten meliputi:
   a. Rencana Jangka Menengah/Rencana Strategis
   b. Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja
   c. Penetapan Kinerja
   d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
   e. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
   f. Pemantauan dan pengendalian Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

(2) Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya bertujuan:
   a. Untuk memperoleh Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen Kinerja secara baik;
   b. Untuk memperoleh Ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi yang digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

BAB III
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

Idikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022 sebagai mana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5.....

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 15 Oktober 2018 M
6 Shafar 1440 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 16 Oktober 2018 M
7 Shafar 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T.E. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018 NOMOR: 263

Lampiran I : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 35 Tahun 2018
Tanggal : 15 Oktober 2018 M
6 Shafar 1440 H

RINCIAN TARGET AWAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR		TARGET
1	2	3		4
1	**Mewujudkan penegakan dan pengamalan Syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan bermasyarakat**	1	Persentase penyelesaian pelanggaran kasus Syariat Islam	50 %
		2	Persentase dayah yang memenuhi standarisasi Dayah	32 Dayah
		3	Jumlah penerimaan ZIS	9 Milyar
		4	Jumlah Hafidz Al-Qur'an	56 Orang
		5	jumlah perolehan medali pada MTQ tingkat provinsi dan nasional	9 Piagam
2	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government)**	1	Perolehan Opini atas Laporan Keuangan	WTP
		2	Tingkat Kapabilitas APIP	3 Level
		3	Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Nagan Raya	50.01 Nilai
		4	Tingkat pertisipasi keterwakilan masyarakat dalam musrenbang	60 %
		5	Persentase data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu	20 %
		6	Persentase OPD yang melaksanakan PPRG	10 %
		7	Jumlah produk hukum yang ditetapkan	265 Dokumen
3	**Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam upaya memberantas kemiskinan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**	1	Angka Kemiskinan	18.21 %
		2	Angka Pengangguran	3.6 %
		3	Persentase PAD terhadap APBK	10.56 %
		4	Produksi Pertanian	165.400 Ton
		5	Produksi Perikanan	3.420,15 Ton
		6	Nilai Tukar Petani (NTP)	
		7	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	99,00 %
		8	Kecukupan Pangan Utama	Cukup
4	**Meningkatnya kualitas pendidikan yang mampu dijangkau seluruh lapisan masyarakat Nagan Raya**	1	Angka Melek Huruf	94.34 %
		2	Angka Rata - rata lama sekolah	8.32 Tahun
		3	Persentase kualifikasi guru D4/S-1	45.1%

		4	Angka Partisipasi Murni : a. SD/MI b. SMP/MTS	20.495 Orang a. 100 % b. 100 %
		5	Angka Partisipasi Kasar : a. SD/MI b. SMP/MTS	20.495 Piagam a. 100 % b. 100 %
5	**Mewujudkan pembagunan adat dan budaya melalui serta pemuda dan olah raga guna meningkatkan daya saing daerah**	**1**	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Nagan Raya	4.783 Orang
		2	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	14 OKP
		3	Jumlah perolehan medali pada event olahraga tingkat provinsi dan nasional	18 Medali
		4	Frekuensi event piasan seni dan budaya yang terselenggara	7 Kali
6	**Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan mantan kombatan, orang miskin dan korban konflik**	**1**	Persentase masyarakat miskin yang mendapat pemberdayaan	51.22 %
		2	Persentase PMKS yang tertangani	86.60 %
		3	Jumlah kelompok perempuan yang diberdayakan	28.49 %
7	**Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Nagan Raya**	**1**	Usia Harapan Hidup	68.8 Tahun
		2	Angka Kematian Ibu	98.98 / 100000 LH
		3	Angka Kematian Bayi	5.46 / 1000 LH
		4	Angka Kematian Balita	37.07 / 1000 LH
		5	Persentase Balita gizi buruk	0.08 %
8	**Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar wilayah dalam mendukung ekonomi kreatif**	**1**	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	280.07 Km
		2	Jumlah sawah yang terairi irigasi	17.917 Ha
		3	Persentase akses sanitasi	46.2 %
		4	Persentase akses air minum non perpipaan	63.97 %
		5	Jumlah rumah layak huni yang di bangun	852 Unit
		6	Persentase ruang terbuka hijau	7.8 %
		7	Jumlah arus penumpang angkutan umum per tahun	5.000 Orang

BUPATI NAGAN RAYA,

Ttd

M. JAMIN IDHAM

Lampiran II : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 35 Tahun 2018
Tanggal : 15 Oktober 2018 M
6 Shafar 1440 H

RINCIAN TARGET AWAL DAN AKHIR
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2018-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR		TARGET	AWAL	AKHIR
1	2	3		4	5	6
1	**Mewujudkan penegakan dan pengamalan Syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan bermasyarakat**	**1**	Persentase penyelesaian pelanggaran kasus Syariat Islam	50 %	51 %	57%
		2	Persentase dayah yang memenuhi standarisasi Dayah	32 Dayah	10 Dayah	11 Dayah
		3	Jumlah penerimaan ZIS	9 Milyar	7.5 Milyar	11.5 Milyar
		4	Jumlah Hafidz Al-Qur'an	32 Orang	23 Orang	100 Orang
		5	Jumlah perolehan medali pada MTQ tingkat provinsi dan nasional	9 Piagam	-	-
2	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government)**	**1**	Perolehan Opini atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
		2	Tingkat Kapabilitas APIP	3 Level	-	-
		3	Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Nagan Raya	50.01 Nilai	-	-
		4	Tingkat pertisipasi keterwakilan masyarakat dalam musrenbang	60 %	-	-
		5	Persentase data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu	20 %	-	-
		6	Persentase OPD yang melaksanakan PPRG	10 %	-	-
		7	Jumlah produk hukum yang ditetapkan	265 Dokumen	-	-
3	**Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam upaya memberantas kemiskinan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**	**1**	Angka Kemiskinan	18.21 %	19.17 %	14.07 %
		2	Angka Pengangguran	3.6 %	-	-
		3	Persentase PAD terhadap APBK	10.56 %	10.06 %	12.56 %
		4	Produksi Pertanian	165.400 Ton	170.151 Ton	217.160 Ton
		5	Produksi Perikanan	3.420 Ton	2.532 Ton	4.452 Ton
		6	Nilai Tukar Petani (NTP)	……		
		7	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	99,00 %	99,00 %	101 %
		8	Kecukupan Pangan Utama	Cukup	Cukup	Cukup

NO	SASARAN	INDIKATOR		TARGET	AWAL	AKHIR
1	2	3		4	5	6
4	**Meningkatnya kualitas pendidikan yang mampu dijangkau seluruh lapisan masyarakat Nagan Raya**	1	Angka Melek Huruf	94.34 %	93.41 %	98.17 %
		2	Angka Rata - rata lama sekolah	8.32 Tahun	8.24 Tahun	8.66 Tahun
		3	Persentase kualifikasi guru D4/S-1	45.1%	37.5 %	93.3 %
		4	Angka Partisipasi Murni : a. SD/MI b. SMP/MTS	 a. 100 % b. 100 %	 a. 98.73 % b. 88.83 %	 a. 99.08 % b. 89.15 %
		5	Angka Partisipasi Kasar : a. SD/MI b. SMP/MTS	 a. 100 % b. 100 %	 a. 109.47 % b. 106.90 %	 a. 103.75 % b. 104.67 %
5	**Mewujudkan pembagunan adat dan budaya melalui serta pemuda dan olah raga guna meningkatkan daya saing daerah**	1	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Nagan Raya	4.783 Orang	-	-
		2	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	14 OKP	10 OKP	23 OKP
		3	Jumlah perolehan medali pada event olahraga tingkat provinsi dan nasional	18 Medali	-	-
		4	Event piasan seni dan budaya yang terselenggara	7 Kali	2 Kali	6 Kali
6	**Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan mantan kombatan, orang miskin dan korban konflik**	1	Persentase masyarakat miskin yang mendapat pemberdayaan	51.22 %	-	-
		2	Persentase PMKS yang tertangani	86.60 %	23.74 %	59.07 %
		3	Jumlah kelompok perempuan yang diberdayakan	28.49 %	-	-
7	**Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Nagan Raya**	1	Usia Harapan Hidup	68.8 Tahun	68.7 Tahun	69.2 Tahun
		2	Angka Kematian Ibu	98.98 / 100000 LH	99.68 / 100000 LH	96.07 / 100000 LH
		3	Angka Kematian Bayi	5.46 / 1000 LH	5.18 / 1000 LH	3.58 / 1000 LH
		4	Angka Kematian Balita	37.07 / 1000 LH	36.90 / 1000 LH	35.97 / 1000 LH
		5	Persentase Balita gizi buruk	0.08 %	0.07 %	0.05 %

NO	SASARAN	INDIKATOR		TARGET	AWAL	AKHIR
1	2	3		4	5	6
8	**Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar wilayah dalam mendukung ekonomi kreatif**	**1**	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	280.07 Km	243.54 Km	489.85 Km
		2	Luas areal sawah yang terairi irigasi	17.917 Ha	17.597 Ha	18.645 Ha
		3	Persentase akses sanitasi	46.2 %	42 %	67.64 %
		4	Persentase akses air minum non perpipaan	63.97 %	0	35 %
		5	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	852 Unit	607 Unit	1.670 Unit
		6	Persentase ruang terbuka hijau	7.8 %	7.8 %	30 %
		7	Jumlah arus penumpang angkutan umum per tahun	5.000 Orang	5.000 Orang	5.000 Orang

BUPATI NAGAN RAYA,

Ttd

M. JAMIN IDHAM

Lampiran III : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 35 Tahun 2018
Tanggal : 15 Oktober 2018 M
6 Shafar 1440 H

RINCIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2018 s/d 2022

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Pertumbuhan PDRB	%	4,40	4,71	4,99	5,29	5,61	5,94	5,94
2	PDRB per kapita ADHB	Rp (Juta)	39,07	39,67	40,27	40,87	41,47	42,07	42,07
3	Jumlah Penduduk Miskin	%	19,17	18,02	16,94	15,92	14,97	14,07	14,07
4	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM)	Indeks	67,66	67,93	68,47	68,95	69,57	70,20	70,20
5	Angka melek huruf	%	93,41	94,34	95,29	96,24	97,20	98,17	98,17
6	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,24	8,32	8,41	8,49	8,57	8,66	8,66
7	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,09	14,23	14,37	14,52	14,66	14,81	14,81
8	Angka usia harapan hidup	Tahun	68,70	68,80	68,95	69,98	69,03	69,24	69,24
9	Persentase balita gizi buruk	%	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
10	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	37,34	36,54	35,85	34,74	35,05	33,93	33,93
11	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Kasus	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00
12	Pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	Orang	7.864,00	7.864,00	7.864,00	7.864,00	7.864,00	7.864,00	7.864,00
13	Perusahaan peserta jamsostek	Orang	89,00	102,00	109,00	113,00	116,00	117,00	117,00

14	Kasus kecelakaan pekerja	%	16,00	12,00	8,00	4,00	2,00	0,00	0,00
15	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	10,06	10,56	11,06	11,56	12,06	12,56	12,56
16	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14
18	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53
19	Kontribusi sektor pengadaan listrik dan gas terhadap PDRB	%	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,12
20	Kontribusi sektor konstruksi terhadap PDRB	%	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86
21	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB	%	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69
22	Kontribusi sektor Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB	%	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79
23	Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	%	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359
24	Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDRB	%	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
25	Kontribusi sektor jasa keuangan dan informasi terhadap PDRB	%	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
26	Kontribusi sektor Real Estat terhadap PDRB	%	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
27	Kontribusi sektor jasa perusahaan terhadap PDRB	%	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
28	Kontribusi sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan sosial terhadap PDRB	%	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22
29	Kontribusi sektor pendidikan terhadap	%	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70

	PDRB								
30	Kontribusi sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial terhadap PDRB	%	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
31	Kontribusi sektor jasa lainnya terhadap PDRB	%	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
32	Produksi sektor pertanian padi dan palawija	Ton	190.543	199.043	207.543	216.043	224.543	233.043	233.043
33	Produksi pertanian padi	Ton	170.151	178.505	187.591	196.971	206.819	217.160	217.160
34	Produksi sektor perkebunan	Ton	128.064	143.064	158.064	173.064	188.064	203.064	203.064
35	Produksi perkebunan sawit	Ton	316.164	363.589	418.127	480.846	522.973	635.919	635.919
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Tindak pidana yang tertangani	%	64,84	66,14	67,46	68,81	70,18	71,59	71,59
2	Rasio ketergantungan	Indeks	50,96	49,94	48,94	47,96	47,00	46,06	46,06
PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib Dasar									
1.	**Pendidikan**								
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	23,83	24,19	24,63	25,00	25,62	26,08	26,08
1.2.	Angka Partisipasi Kasar	%							
	APK SD/MI/Paket A	%	109,47	109,03	108,28	107,34	106,19	103,75	103,75
	APK SMP/MTs/Paket B	%	106,90	106,46	106,31	105,86	105,12	104,67	104,67
	APK SMA/SMK/	%	86,02	86,57	86,81	87,35	89,20	89,74	89,74
1.3.	Angka pendidikan yang ditamatkan	%							

	Tamat SD Sederajat	%	26,70	27,22	28,43	28,94	30,46	30,97	30,97
	Tamat SLTP Sederajat	%	16,87	17,38	19,19	21,70	23,71	24,22	24,22
	Diploma I/II/III	%	3,33	3,43	3,63	4,13	4,43	4,93	4,93
	Diploma IV/S1	%	3,72	4,22	5,42	5,92	7,43	7,93	7.93
	S2/S3	%	0,59	0,74	0,89	1,09	1,39	1,59	1,59
1.4	Angka Partisipasi Murni								
1.4.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	98,73	98,78	98,83	98,88	98,93	99,08	99,08
1.4.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	88,83	88,88	88,92	88,97	89,01	89,15	89,15
1.5.	Angka Partisipasi Sekolah								
1.5.1.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99,36	99,37	99,40	99,41	99,43	99,48	99,48
1.5.2.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	99,11	99,12	99,15	99,16	99,18	99,23	99,23
1.8.	Angka Melanjutkan (AM):								
1.8.1.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTS	%	100	100	100	100	100	100	100
1.8.2.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	%	91,15	91,33	91,79	93,16	93,63	93,77	93,77
1.9.	Fasilitas Pendidikan:								
1.9.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	85,70	94,27	94,74	96,16	96,64	96,79	96,79
1.9.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTS dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	87,60	88,91	90,25	91,60	92,98	94,37	94,37
1.10.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio Index	69,82	69,96	70,31	72,07	73,15	74,73	74,73

1.11.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio Index	33,71	33,78	33,94	34,79	35,31	36,07	36,07
1.12.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio Index	75,66	74,82	73,19	65,02	58,00	54,24	54,24
1.13.	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Rasio Index	81,63	80,79	79,19	71,17	64,24	60,62	60,62
1.14.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio Index	71,18	70,32	68,67	60,39	53,30	49,44	49,44
1.15.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	Rasio Index	69,96	69,10	67,45	59,13	52,02	48,14	48,14
1.16.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	37,51	45,01	54,01	64,82	77,78	93,34	93,34
2.	**Kesehatan**								
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran	5,18	4,99	4,91	4,44	3,70	3,58	3,58
2.2.	Angka kelangsungan hidup bayi	/1000 Kelahiran	4,85	4,66	4,58	4,09	3,36	3,23	3,23
2.3.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran	36,90	36,78	36,46	36,37	36,12	35,97	35,97
2.4.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran	13,86	13,69	13,26	12,59	11,98	11,79	11,79
2.5.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran	99,68	98,98	98,78	97,76	96,42	96,07	96,07
2.6.	Rasio posyandu per satuan balita	/1000 Balita	19,76	19,79	19,90	20,05	20,30	20,33	20,33
2.7.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	/1000 Penduduk							
	Puskesmas	/1000 Penduduk	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

	Poliklinik	/1000 Penduduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pustu	/1000 Penduduk	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
2.8.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2.9.	Rasio dokter per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Dokter Umum	/100.000 penduduk	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25
	Dokter Spesialis	/100.000 penduduk	0,03	0,03	0,09	0,28	0,83	0,84	0,84
	Dokter Gigi	/100.000 penduduk	0,02	0,02	0,08	0,16	0,53	0,54	0,54
2.10.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	/1000 Penduduk	3,31	3,31	3,33	3,36	3,40	3,41	3,41
2.11.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	52,25	52,33	52,62	53,01	53,68	53,76	53,76
2.12.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	93,11	93,25	93,77	94,47	95,65	95,79	95,79
2.13.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	77,33	77,45	77,87	78,46	79,44	79,56	79,56
2.14.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100
2.16.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	91,62	91,76	92,26	92,95	94,12	94,26	94,26
2.18.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	18,76	18,79	18,89	19,03	19,27	19,30	19,30
2.19.	Cakupan penemuan dan penangan penderita TBC BTA	%	49,03	49,10	49,37	49,74	50,36	50,44	50,44

2.20.	Tingkat prevelensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	/100.000 penduduk	102,19	101,89	95,30	91,08	86,65	85,96	85,96
2.21.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 1000. 000 penduduk)	/100.000 penduduk	2,56	2,37	2,28	2,25	2,20	2,04	2,04
2.22.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	63,38	63,47	63,82	64,30	65,10	65,20	65,20
2.23.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	68,33	68,43	68,81	69,32	70,19	70,29	70,29
2.24.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100
2.26.	Angka kejadian Malaria	/100.000 penduduk	2,39	2,29	2,23	1,98	1,81	1,33	1,33
2.34.	Cakupan kunjungan bayi	%	84,73	85,71	86,18	86,82	87,91	88,04	88,04
2.36.	Cakupan pembantu puskesmas	%	21,17	21,17	21,17	21,17	21,17	21,17	21,17
2.37.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	93,50	94,58	95,10	95,81	97,01	97,15	97,15
2.38.	Cakupan pelayanan nifas	%	92,12	93,18	93,69	94,39	95,57	95,71	95,71
2.39.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	71,27	72,09	73,93	76,71	78,43	78,55	78,55
2.40.	Cakupan pelayanan anak balita	%	81,68	82,62	84,73	87,91	89,89	90,02	90,02
2.41.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	%	91,13	91,27	92,68	95,23	96,42	96,56	96,56
2.44.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100	100	100

3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
3.1.	**Pekerjaan Umum:**								
3.1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		243,54	280,07	322,08	370,39	425,95	489,85	489,85
3.1.2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Rasio Index	1,54	1,73	1,95	2,19	2,46	2,75	2,75
3.1.3.	Persentase akses air minum perpipaan	%	42	46,2	50,82	55,90	61,49	67,64	67,64
3.1.4.	Persentase akses air minum non perpipaan	%	0	0	10	20	30	35	35
3.1.5.	Jumlah sawah yang terlayani irigasi	Ha	17.597	17.917	18.096	18.277	18.460	18.645	18.645
3.1.6.	Jumlah rumah layak huni yang terbangun	Unit	607	852	1070	1270	1470	1670	1670
3.1.7.	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	Unit	29	35	50	60	70	80	80
3.2.	**Penataan Ruang:**								
3.2.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Ha	7,8	7,8	12	17	25	30	30
3.2.2.	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	%	0,07	0,074	0,077	0,081	0,085	0,089	0,089
4.	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**								
3.1.6.	Jumlah rumah layak huni yang terbangun	Unit	607	852	1070	1270	1470	1670	1670
3.1.7.	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	Unit	29	35	50	60	70	80	80

5.	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**								
5.2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	98,75	98,80	98,85	99,10	99,44	99,49	99,49
5.3.	Persentase Penegakkan PERDA	%	100	100	100	100	100	100	100
6.	**Sosial**								
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	24,83	24,95	25,07	25,20	25,33	25,45	25,45
	Fakir Miskin (Pemberdayaan)	Orang	97,12	97,17	97,22	97,46	97,80	97,85	97,85
	Penyandang Disabilitas (Alat Bantu)	Orang	11,20	11,21	17,37	24,36	39,06	54,70	54,70
	Jumlah Panti Asuhan (Permakanan Panti)	Anak	4	4	4	4	4	4	4,00
	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Unit	15,57	18,68	22,41	26,90	32,28	38,73	38,73
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	%	23,74	28,49	34,19	41,02	49,23	59,07	59,07
6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	23,74	28,49	34,18	41,02	49,22	59,07	59,07
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
1.	**Tenaga Kerja**								
1.5.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na
1.12.	Rasio lulusan S1/S2/S3	/10.000 Penduduk	332,33	398,79	478,55	574,26	689,11	826,93	826,93
2.	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	%	52,27	52,37	52,48	52,58	52,69	52,79	52,79
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	16,00	16,00	16,80	17,64	18,52	19,45	19,45

2.4.	Rasio KDRT	%	N/A	0,30	0,29	0,27	0,26	0,24	0,24
3.	**Pangan**								
3.1.	Ketersediaan pangan utama	kg	110,598	116,128	120,128	124,128	128,128	132,128	132,128
5.	**Lingkungan Hidup**								
	Kabupaten/Kota								
5.26.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.27.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.28.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	Ada/tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								
6.1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	73,80	88,56	89,62	90,69	91,78	92,88	92,88
6.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	%	88,51	88,95	90,29	92,54	94,40	95,34	95,34
6.5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6.6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	85,28	86,99	88,73	90,32	92,58	94,43	94,43
7.	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
7.1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%							
7.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	Kelompok							

	(LPM)								
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok							
7.4.	Persentase LSM aktif	%							
7.5.	Persentase LPM Berprestasi	%							
7.6.	Persentase PKK aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.7.	Persentase Posyandu aktif	%							
7.8.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%							
7.9.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%							
8.	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
8.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,05	2,15	2,26	2,37	2,49	2,62	
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)								
8.8.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak							
8.9.	Rasio Akseptor KB	%							
8.10.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	81,91	82,6	83,2	83,9	84,6	85,2	85,2
8.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	/1.000 perempuan							
8.23.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%							
9.	**Perhubungan**								
9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Trayek/Frek							
	Angkutan Darat	Trayek							
	Angkutan Udara	Frek							
9.2.	Rasio ijin trayek	Index	2,0	2	3	3	3	3	
9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit							

9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit							
	Jumlah Bandar Udara	Unit	1	1	1	1	1	1	1
	Jumlah Terminal Tipe B	Unit	1	1	1	1	1	1	1
	Jumlah Terminal Tipe C	Unit	4	4	4	4	4	4	4
9.5.	Persentase layanan angkutan darat	%							
9.6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%							
9.7.	Pemasangan Rambu-rambu	%							
9.8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio Index	6,25	6,38	6,50	6,63	6,77	6,90	6,90
9.9.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang							
	Angkutan Udara	Orang	26.640	26.693	26.707	26.747	26.792	26.846	26.846
9.10.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Orang							
	Bandara	Kg	159.840	160.160	160.240	160.480	160.753	161.074	161.074
10.	**Komunikasi dan Informatika**								
10.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	0,40	0,42	0,44	0,46	0,49	0,51	0,51
10.2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	80	80	80	85	90	95	95
10.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	74	74	74	75	80	85	85
11.	**Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**								
11.1.	Persentase koperasi aktif	%	43,68	50,68	57,68	64,68	71,68	78,68	78,68
	Persentase koperasi tidak aktif	%	59,47	49,32	42,32	35,32	28,32	21,32	21,32

12.	**Penanaman Modal**								
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	5,33	6	6	6	6	7	7
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (Milyar)	500,00	600	700	800	900	1.000	1.000
12.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	Orang	557,54	758	958	1.158	1.358	1.558	1.558
12.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Rp (Milyar)	148,52	178,52	208,52	238,52	268,52	298,52	298,52
13.	**Kepemudaan dan Olah Raga**								
13.1.	Jumlah Organisasi pemuda yang aktif	Organisasi	10	14	18	20	22	23	23
13.3.	Cakupan pembinaan olahraga	%	100	100	100	100	100	100	100
13.4.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	84,00	88,20	89,96	90,86	92,68	94,53	94,53
13.5.	Cakupan pembinaan atlet muda	%	30,45	31,97	43,16	50,93	53,22	55,99	55,99
13.6.	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	2	3	8	10	12	15	15
13.7.	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	5	5	7	8	10	10	10
14.	**Statistik**								
14.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.2.	Buku ”kabupaten dalam angka”	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.3.	Buku ”PDRB”	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15.	**Persandian**								
15.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16.	**Kebudayaan**								
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festifal	2	3	4	5	6	6	6
16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	3	3	4	4	5	5	5

16.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		0	0	0	1	2	3	3
17.	**Perpustakaan**								
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	1,781	1,798	1,816	1,835	1,85	1,87	1,87
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah								
17.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	/1.000 Penduduk							
17.4.	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	Orang	1.597	1.601	1.606	1.614	1.627	1.631	1.631
17.5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	2.877	2.884	2.894	2.907	2.932	2.940	2.940
17.6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	0	0	1	1	2	2	2
18.	**Kearsipan**								
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	2,22	4,44	6,67	8,89	11,11	11,11	11,11
18.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	1	1	2	2	3	3	3
Layanan Urusan Pilihan									
1.	**Pariwisata**								
1.1.	Kunjungan wisata	%	90,05	90,50	92,76	96,00	97,44	97,93	97,93
1.2.	Lama kunjungan wisata	Hari	15,00	15,08	15,45	16,30	16,55	16,63	16,63
2.	**Pertanian**								
2.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton	6.858	7.108	7.358	7.608	7.858	8.858	8.858

2.2.	Cakupan bina kelompok petani	%	93,63	94,63	95,63	96,63	97,63	98,63	98,63
4.	**Energi dan Sumber Daya Mineral**								
4.1.	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%							
4.2.	Rasio ketersediaan daya listrik	Rasio Indeks							
4.3.	Persentase pertambangan tanpa ijin	%							
5.	**Perdagangan**								
5.1.	Ekspor Bersih Perdagangan	%	Na	Na	Na	Na	Na	Na	
5.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	Na	Na	Na	Na	Na	Na	
6.	**Perindustrian**								
6.1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	%							
7.	**Transmigrasi**								
7.1.	Jumlah transmigran lokal	Lokasi	4	5	5	5	6	6	6
7.2.	Jumlah transmigrasi	UPT	16	16	16	16	16	16	16
8.	**Kelautan dan Perikanan**								
8.1.	Produksi perikanan (Ton Produksi Persentase Terhadap Target Produksi Aceh)	%							
	Produksi perikanan ikan	Ton	2.532,77	2.916,77	3.300,77	3.684,77	4.068,77	4.452,77	4.452,77
	- Perikanan Tangkap	Ton	1.863,05	2.115	2.367	2.619	2.871	3.123	3.123
	- Perikanan Budidaya	Ton	669,7	802	934	1.066	1.198	1.330	1.330
8.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	%	90	92	94	96	98	100	100
9.	**Peternakan**								
9.1.	Pupulasi ternak besar (sapi dan kerbau**)**	ekor	20.824	21.377	21.930	22.483	23.036	23.589	23.589

9.2.	Populasi ternak kecil (kambing dan domba)	ekor	12.169	12.649	13.129	13.609	14.089	14.569	14.569
Penunjang Urusan									
1.	**Perancangan Pembangunan**								
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPK yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/ tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMK yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPK yang telah ditetapkan dengan PERBUB	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMK kedalam RKPK	%							
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPK kedalam APBK	%							
1.7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%							
2.	**Keuangan**	**Kab/Kot**							
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2.	Persentase SILPA	%							
2.3.	Persentase SILPA terhadap APBD	%							
2.4.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	22,46	11,23	5,62	2,81	1,40	0,70	0,70
2.5.	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	20	20	20	20	20	20	20
2.6.	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	10	10	10	10	10	10	10

2.7.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%							
2.8.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	10	10	10	10	10	10	10
2.9.	Penetapan APBD	Tepat/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3.	**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**								
3.1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan								
3.2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	16,79	16,87	17,30	18,25	18,52	18,61	18,61
3.3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	40,20	40,40	41,41	43,69	44,34	44,57	44,57
3.4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah		526	529	542	572	581	583	583
3.5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah		35	35	36	38	38	38	38
3.6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		3.152	3.168	3.247	3.425	3.477	3.494	3.494
4.	**Penelitian dan pengembangan**								
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	25	30	36	43	52	62	62
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	N/A	N/A	15	20	25	30	30
	Penerapan SIDa:	Sudah/ Belum	Belum	Belum	Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
4.3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi	%	N/A	N/A	N/A	15	15	20	20

	daerah.								
4.4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	N/A	N/A	N/A	10	15	20	20
5.	**Pengawasan**								
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan	%							
5.2.	Persentase pelanggaran pegawai	%							
5.3.	Jumlah temuan BPK	Temuan							
6.	**Sekretariat Dewan**								
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Keistimewaan dan Kekhususan Aceh									
1.	**Pendidikan**								
1.1.	Jumlah Penghafal Al-Qur'an (Hafiz) 30 Juz	Orang	23	23	40	60	80	100	100
1.2.	Angka melek Al-Quran penduduk usia 06 - 21 tahun, yang beragama islam	%	82	83	85	90	91	91	91
1.3.	Angka melek Al-Quran penduduk umur > 21 tahun, yang beragama islam	%	79	80	82	86	87	88	88
1.4.	Standarisasi Pendidikan Dayah	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.5.	Persentase dayang Memenuhi Standarisasi Pendidikan Dayah (Dayah Tipe)	%	10	10	11	11	11	11	11
2.	**Kebudayaan**								
2.3.	Jumlah gampong/mukim yang melaksanakan peradilan adat yang telah diverifikasi	Gampong	6	6	6	7	7	7	7
2.4.	Persentase penyelesaian sengketa di tingkat gampong dan mukim	%	73	75	76	81	82	82	82
2.5.	Persentase keputusan, seruan, himbauan, naskah, hasil kajian adat dan istiadat yang diadopsi pemerintah daerah dan masyarakat	%	82	83	85	90	91	91	91
2.8.	Meningkatnya pemahaman terhadap Aktualisasi Nilai-nilai Sejarah, Seni , Adat, Istiadat Aceh yang Bernilai Luhur	Wilayah	34	34	35	37	37	38	38

3.	**Keagamaan**								
3.2.	Pemberdayaan sarana dan prasarana keagamaan (%)	Unit	454	454	454	454	454	454	454
3.3.	Pembinaan dakwah agama bagi masyarakat	Orang	204	207	212	224	227	228	228
3.4.	Rata-Rata Jamaah mesjid (Agung dan Jamik) Per Waktu Sholat	Orang	32	32	33	35	35	35	35
3.5.	Jumlah Mesjid yang melaksanakan shalat 5 waktu secara rutin	Mesjid	48	49	50	53	53	54	54
3.6.	Pembinaan Dinul Islam	Orang	267	271	278	293	298	299	299
3.7.	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syari'at Islam	%	51	52	53	56	57	57	57
3.11.	Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi	Orang	158	160	164	174	176	177	177
3.11.	Jumlah Penghimpunan ZISWAF	Rp (000)	7.545	9.000	9.500	10.000	10.500	11.500	11.500
3.11.	Jumlah ZISWAF yang disalurkan	Rp (000)	7.545	9.000	9.500	10.000	10.500	11.500	11.500
4.	**Kesatuan dan Perdamaian**								
4.1.	Jumlah Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik	Orang	N/A						
4.2.	Jumlah Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Konflik	Orang	N/A						
4.4.	Jumlah Anak Korban Konflik Yang Mendapat Perhatian Pemerintah	Orang	N/A						
4.5.	Jumlah Rumah Korban Konflik Yang di Bangun	Unit	N/A						

Keistimewaan dan Kekhususan Aceh									
1.	**Kesatuan Bangsa dan Politik**								
1.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan							
1.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	Kegiatan							
	Jumlah LSM	LSM	2	2	3	4	5	5	

BUPATI NAGAN RAYA,

Ttd

M. JAMIN IDHAM